

PEMROV NTB JADIKAN POSYANDU PROGRAM UNGGULAN KESEHATAN



<http://www.rmoljabar.com/>

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemrov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencanangkan revitalisasi Posyandu sebagai program unggulan kesehatan. Isu ini dibahas dalam rapat yang dilaksanakan di Gedung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, Direktorat Jendral Kesehatan Kirana Pritasari, dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalillah, Selasa (5/8).

“Revitalisasi Posyandu adalah upaya mengoptimalkan fungsi dan strata posyandu guna meningkatkan fungsi posyandu mandiri menjadi posyandu keluarga yang melayani semua anggota keluarga dalam bentuk posyandu remaja, posbindu, dan posyandu lansia, serta deteksi dini berbagai persoalan sosial sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat berbasis dusun,” papar Sitti di Jakarta.

Dia mengatakan, fungsi Posyandu saat ini masih sebatas hanya untuk melakukan pemeriksaan ibu dan anak saja. Dengan revitalisasi, Posyandu juga akan fokus pada Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembagaan, Sarpras, SIM dan Konvergensi sehingga nantinya akan menciptakan ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial.

Dia menerangkan, Revitalisasi Posyandu akan memberikan pengetahuan-pengetahuan mengenai NTB sesuai dengan Jenis posyandunya. Sitti menambahkan, tidak hanya untuk kesehatan, masyarakat juga akan mendapatkan edukasi yang berhubungan dengan masalah-masalah di NTB.

Dia mengatakan, di Posyandu KIA akan ada Binaan Keluarga Batita (BKB), kelas stunting, kelas ibu hamil. Kemudian, Posyandu Remaja akan membahas bahaya narkoba dan buruh migran ilegal. Begitu pula dengan Posyandu Lansia yang membahas mengenai Pelayanan Kesehatan dan deteksi dini. Ini juga akan berbeda pula dengan Posbindu yang

membahas Zero Waste, kebencanaan, lingkungan hidup. Untuk mendukung hal tersebut akan ada kader-kader yang berkompeten di bidangnya.

“Dengan adanya Revitalisasi Posyandu ini, kita ingin posyandu yang kita miliki menjadi ujung tombak penyelesaian masalah kesehatan dan sosial dari hulu, bukan dari hilir saja. Jadi, nanti kita akan bentuk posyandu tidak hanya untuk balita saja, namun juga untuk remaja dan lansia jadi nanti ada Lansia KIA. Posyandu tersebut akan menjadi satu kesatuan yang nantinya akan menjadi Posyandu Keluarga” ujar Sitti.

Dia mengatakan, tahun ini diharapkan sudah ada sekitar 400 Posyandu mandiri dan Posyandu keluarga. “Sekitar 200 harapannya nanti pada tahun 2023 kita menargetkan seluruh posyandu yang ada akan menjadi posyandu keluarga,” ujar Sitti.

Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek mengapresiasi kinerja Pemprov NTB untuk mengembangkan program-program kesehatan yang menjadi unggulan. Dia berharap Pemprov NTB terus mengembangkan program-program unggulan untuk membangkitkan pembangunan pascabencana tsunami dan tidak luput peran-peran penting dari semua sektor kesehatan untuk mendukung program unggulan tersebut.

“Saya mengapresiasi kinerja dari Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh jajaran Pemprov NTB yang fokus untuk menyejahterakan masyarakatnya dari segala aspek terutama kesehatan, karena tidak banyak pemprov yang membuat program Revitalisasi Posyandu yang tidak hanya fokus pada ibu dan anak saja namun juga memikirkan untuk remaja dan lansia,” ujar Nila.

Sumber Berita:

1. <https://nasional.republika.co.id/berita/pvsc9456/pemprov-ntb-jadikan-posyandu-program-unggulan-kesehatan>
2. <https://mediaindonesia.com/read/detail/251604-pemprov-ntb-buat-program-unggulan-kesehatan>
3. <https://www.wartaekonomi.co.id/read239622/optimalikan-fungsi-posyandu-pemprov-ntb-bentuk-program-unggulan-kesehatan.html>
4. <https://www.beritasatu.com/nasional/568141/ntb-bentuk-program-unggulan-kesehatan>

Catatan:

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Permenkes 39/2016), disebutkan bahwa Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses keluarga berserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar;
- b. mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota; melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan;

- c. mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d. mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Permenkes 39/2016 disebutkan bahwa Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga terdiri atas 4 (empat) area prioritas yang meliputi:

- a. penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- b. penurunan prevalensi balita pendek (stunting);
- c. penanggulangan penyakit menular; dan
- d. penanggulangan penyakit tidak menular.

Penjelasan secara teknis mengenai Prioritas Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019 dijelaskan dalam Lampiran I Permenkes 39/2016 BAB II, yang menyatakan bahwa salah satu Penetapan area prioritas Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dalam fokus huruf c) Balita, yaitu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Melakukan revitalisasi Posyandu.
- (2) Memperkuat kelembagaan Pokjanal Posyandu.
- (3) Meningkatkan transformasi KMS ke dalam Buku KIA.
- (4) Memperkuat kader Posyandu.

Sedangkan pedoman dalam Pengintegrasian Posyandu telah diatur sebelumnya dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Permendagri 19/2011). Dalam Pasal 1 angka 1 pengertian Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Permendagri 19/2011 dinyatakan bahwa Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa/kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu. Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah dan Posyandu bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Kegiatan-kegiatan Posyandu meliputi kegiatan antara lain:

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;

- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.